

BAB II

Perkembangan dan Permasalahan UMKM Di Kota Bandung

Dalam Bab Kedua ini, penulis akan menjelaskan tentang perkembangan&permasalahan UMKM di Kota Bandung beserta kebijakan yang yang diterapkan hingga terbentuknya *Little Bandung*. Uraian penjelasan dimulai dari Gambaran umum Kota Bandung, Perkembangan UMKM Kota Bandung, dan Upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan UMKM melalui *Little Bandung* , Kebijakan Walikota Ridwan Kamil dan Walikota Sebelumnya (Dada Rosyada) dalam menghadapi permasalahan UMKM Kota Bandung dan proses seleksi pelaku UMKM untuk bergabung dalam *Little Bandung*.

2.1 Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung merupakan salah satu kota terbesar ketiga di Indonesia yang dibentuk saat masa penjajahan Belanda oleh Daendels dan diresmikan pada 25 September 1810, kota ini dipilih sebagai wilayah pemukiman warga negara Belanda karena beberapa faktor, seperti iklim yang lebih dingin dari kota lainnya, ketinggian tanahnya yang masih baik. Sehingga Kota Bandung sering disebut sebagai “*Paris van Java*” karena iklimnya yang dingin dan banyaknya bangunan peninggalan masa kolonial yang berasa seperti lagi di Eropa.

Pada abad ke-19 Belanda memprediksi bahwa kota ini akan dipenuhi oleh penduduk sebanyak 300.000 orang, namun hingga saat ini jumlah penduduk kota Bandung sudah melebihi angka tersebut karena terjadi peningkatan urbanisasi dalam 3 dekade terakhir yang membuat pemerintah kota Bandung harus meningkatkan pegaturan tata kota dan menyiapkan segala infrastruktur perumahan

bagi warga asli maupun pendatang. Perlu diketahui bahwa berdirinya Kota Bandung berbeda dengan sejarah awal berdirinya Kabupaten Bandung, Karena Kabupaten Bandung terlebih dahulu lahir pada abad ke 17 Masehi yang awalnya dipimpin oleh Bupati Pertama nya Tumenggung Wiraangunangun hingga tahun 1681¹. Setelah masa penjajahan di Indonesia selesai, banyak peninggalan monumen perjuangan rakyat yang ada di Bandung yaitu Monumen Perjuangan Jawa Barat, Monumen Bandung Lautan Api, Monumen Penjara Banceuy, Monumen Kereta Api dan Monumen Pahlawan Cikutra².

Kota Bandung yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat ini memiliki letak yang strategis sehingga memudahkan berjalannya dan berkembangnya roda perekonomian dan penjagaan keamanan, karena Bandung terletak di poros jalan raya jika dari garis Utara-Selatan , bandung terhubung dengan daerah wilayah perkebunan Subang dan Pangalengan. Sedangkan untuk Barat- Timur, Bandung menjadi penghubung jalur dengan Ibukota Negara yaitu Jakarta³.

Perlu diketahui bahwa Kota Bandung merupakan salah satu Kota yang memiliki keunggulan baik dalam aspek *comparative* maupun *competitive* karena memiliki lokasi yang strategis sehingga Kota Bandung mudah dalam menjalin

¹ Wicaksono sarosa,dkk. *Partnerships for the Sustainable Development of Cities in The Apec Regions: Bandung Indonesia* . Diakses dari <https://www.apec.org/-/media/APEC/Publications/2017/6/Partnerships-for-the-Sustainable-Development-of-Cities-in-the-APEC-Region/TOC/3-Bandung-Indonesia.pdf> Pada 10 Juni 2020.

² Eka Rahmat. *Sister City Kota Bandung*. Buku Dokumentasi Bagian Kerjasama Pemkot Bandung.

³ Web Resmi Dinas Cipta Karya Kota Bandung. *Profile Kabupaten/ Kota*. Diakses dari <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jabar/bandung.pdf> Pada 10 November 2018.

Kerjasama Internasional maupun melaksanakan aktivitas Paradiplomasi dengan Kota atau Provinsi lainnya di Luar Negeri⁴.

Dalam menjalin Kerjasama Internasional atau Paradiplomasi dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri tentunya Pemerintah Kota Bandung tetap harus memperhatikan PERMENDAGRI No. 03 Tahun 2008 yaitu adanya, persamaan kedudukan, adanya manfaat yang saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik perekonomian, keamanan dan tetap menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Bandung telah memiliki beberapa banyak negara Mitra baik dalam kerjasama *sister city* maupun kerjasama lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh Kota Bandung sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Kota Bandung sebagai Kota yang dikenal oleh Dunia melalui skema *Public Private Partnership* dan untuk mengapai visi Kota Bandung dalam mewujudkan “Bandung Juara”⁵.

Kota Bandung merupakan pelopor pertama di Indonesia yang menjalankan aktivitas Paradiplomasi pada tahun 1960. Kerjasama paradiplomasi tersebut diwujudkan dalam *Sister city* antara Bandung-Braunschweig Jerman. Seiring berkembangnya jaman dan teknologi akhirnya Kota Bandung juga memperluas mitra kerjasamanya dengan Kota-Kota lain di Luar negeri seperti: Forth Worth – Texas, Amerika Serikat ; Kota Suwon- Republik Korea Selatan; Kota Yingkou,

⁴ Syafira Firdayana. Skripsi. *Strategi Kota Bandung dalam Tata Kelola Perkotaan Melalui Kerjasama Sister City Bandung-Seoul*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/54695/1/PENDAHULUAN.pdf> Pada 5 April 2021.

⁵ Eka Rahmat. *Handbook Sister city Kota Bandung*. Bagian Kerjasama dan Kesekretariatan Daerah Kota Bandung. Bandung: Pemkot Bandung. Hal 9

Liuzhou, Shenzhen – Republik Rakyat China (RRC); Petaling Jaya - Malaysia, dan Namur - Belgia⁶

Selain itu Kota Bandung terkenal dengan sebutan Kota Pariwisata dan Kota Mode yang menghasilkan banyak kerajinan tangan seperti tas kulit, sepatu kulit, jeans, dll. Beberapa faktor tersebut menjadi keunggulan tersendiri bagi Kota Bandung yang mampu meningkatkan daya tarik wisatawan asing maupun lokal. Maka dari itu Pemerintah Kota Bandung selalu memanfaatkan segala kesempatan baik tersebut untuk meningkatkan potensi ekonomi nasionalnya melalui banyak cara yang salah satunya yaitu menjalin *networking* atau kerjasama paradiplomasi dengan pemerintah daerah di Luar Negeri khususnya dalam membantu meningkatkan perekonomian Kota Bandung.

2.2 Perkembangan UMKM Kota Bandung

Letak geografis yang dinilai strategis, tentunya memudahkan aparat keamanan untuk menjaga wilayah Bandung hingga kepenjuru daerah, disisi lain memudahkan proses perkembangan ekonomi dalam hal perdagangan dan bagi pekerja industri ataupun kantor.

Sejak berdirinya Kota Bandung, banyak program dan pembangunan infrastruktur yang dikembangkan oleh pemerintah kota Bandung untuk menjadikan Bandung sebagai kota yang maju dengan perekonomian yang baik karena Kota ini menjadi pusat berjalannya roda perekonomian di Provinsi Jawa Barat dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi di level nasional. Dalam

⁶ Eka Rahmat. Handbook Sister city Kota Bandung. Bagian Kerjasama dan Kesekretariatan Daerah Kota Bandung. Bandung: Pemkot Bandung. Hal 63

melihat aspek ekonomi di Kota Bandung tentunya tidak terlepas dari yang namanya proporsi jumlah penduduk, struktur dan dinamika penduduk kota Bandung karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap berjalannya roda perekonomian dan berkembangnya suatu Kota. Menurut data yang ada di Badan Pusat Statistik Kota Bandung, hingga Tahun 2017 terdapat 2.490.622 Jumlah penduduk, dimana sebanyak 489.575 Jiwa berada di Usia Produktif yang berperan terhadap berjalannya perekonomian⁷.

Beberapa masyarakat Bandung yang berada di Usia Produktif ternyata memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengembangkan usaha-usaha kecil baik seperti usaha makanan, kerajinan tangan, dan distro baju dan Industri kreatif lainnya. Walaupun usaha tersebut tergolong sebagai jenis usaha kecil, Namun tetap menyumbang pendapatan Kota Bandung karena beberapa jenis Industri Kreatif Bandung telah dikenal di mancanegara melalui ekspor, salah satunya adalah produk fashion yang mengikuti trend (Baju, Celana, Tas, dll).

Menurut Pemerintah Kota Bandung, pemasukan terbesar yang membantu meningkatkan perekonomian di Kota Bandung adalah sektor pariwisata yang juga menjadi sektor utama pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung dengan presentase pertumbuhan ekonomi 7,6% sedangkan Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekitar 5%. Pariwisata dan Kebudayaan hingga saat ini 2018, memang masih menjadi salah satu daya tarik pariwisata, namun hal ini juga masih perlu

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Bandung. *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandung*. Diakses dari <https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/08/29/104/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-bandung-2016-.html> Pada 11 November 2018.

ditingkatkan lagi dan dikembangkan dengan baik seperti pendirian kawasan dengan identitas suda yang melekat, rencana tersebut telah di rancang oleh Pemkot Bandung dengan mendirikan Pusat Budaya Sunda di Cibiru untuk dapat menarik lebih banyak lagi Wisatawan baik lokal ataupun asing⁸.

Perlu diketahui bahwa Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) juga menjadi salah satu hal penting yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di suatu daerah karena menurut Badan Pusat Statistik, UMKM di Indonesia telah menyumbang PDB sekitar 57,9% , pemanfaatan tenaga kerja sebesar 97,2% , ekspor non migas 19,9% dan tentunya hal ini berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru bagi 9,6 juta orang. Di Jawa Barat Sendiri, pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas dan mentargetkan terbukanya 100.000 UMKM yang nantinya bisa membantu kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan membantu mengurangi jumlah pengangguran masyarakat Jawa Barat⁹.

2.3 Upaya Pemkot Bandung dalam Mengatasi Permasalahan UMKM melalui *Little Bandung*

Harapan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menjadikan UMKM sebagai salah satu proyek yang membantu meningkatkan perekonomian Kota Bandung ternyata belum bisa di realisasikan dengan mudah, karena mulai tanggal 1 Januari 2016 lahirlah sebuah sistem perdagangan bebas atau *free trade*

⁸ Ilham Budhiman.2017. Pemkot Bandung Bidik Sektor Ekonomi Dari Pariwisata. Diakses dari <http://bandung.bisnis.com/read/20170410/82444/569450/pemkot-bandung-bidik-sektor-ekonomi-dari-pariwisata> Pada 26 November 2018.

⁹ Tini Martini dan Janadi R T. *Kompetensi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Kota Bandung dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Jurnal Penelitian Pendidikan. Diakses dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/9616/5926> Pada 6 Juni 2020.

di ASEAN yang bernama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dibentuk untuk membuat kawasan Asia Tenggara mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Namun perlu diketahui, adanya MEA ternyata membuat para pelaku UMKM di Indonesia maupun di Bandung mengalami ketakutan dalam pemasaran dan kompetisi. Para pelaku UMKM yang mayoritas bukan dari kalangan elit dan berpendidikan tinggi merasa khawatir jika strategi pemasaran dan nilai jual yang dihasilkan oleh pelaku MEA bisa menggeser posisi mereka di pasar lokal maupun global yang nantinya malah membuat bangkrut usaha mereka dan berdampak pada lemahnya perekonomian.

Kekhawatiran yang terjadi pada pelaku UMKM di Kota Bandung sebenarnya yaitu:

1. Minimnya pengetahuan dan ilmu pemasaran para pelaku UMKM Kota Bandung sehingga strategi pemasaran yang dilakukan kurang tepat dan membuat mereka kurang percaya diri untuk memasarkan produknya di Pasar Internasional.
2. Kurangnya Modal yang dimiliki dalam melakukan pemasaran produk di pasar global sehingga usaha tersebut kurang berkembang secara maksimal, apalagi pelaku UMKM dahulunya sering meminjam modal di Renternir sehingga hal tersebut menjadi beban dan permasalahan baru bagi mereka.
3. Pemahaman tentang teknologi yang tergolong masih sangat rendah, sehingga mereka kesulitan dalam memanfaatkan teknologi untuk pemasaran produk

dan mengembangkan usaha apalagi dalam hal design katalog yang masih kurang menarik minat pembeli.

4. Minimnya kesadaran dan pemahaman pentingnya melakukan pendaftaran hak paten merk, logo dan formula agar tidak di klaim oleh pihak lain¹⁰.

Selain itu, para pelaku UMKM mengeluhkan masalah modal, karena mereka mayoritas terpaksa meminjam dana untuk modal usaha nya di Renternir daerah kampung mereka (tidak disebutkan wilayahnya). Bukan hanya resiko yang cukup tinggi dengan peminjaman tersebut, namun bunga yang harus mereka bayarkan juga malah membuat para pelaku UMKM merasa semakin sulit dalam hal ekonomi niatnya ingin untung malah menjadi rugi. Keluhan pelaku UMKM tersebut sering sekali di terima oleh staff Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung. Selain itu, pelaku UMKM juga kurang terampil dalam menggunakan media sosial sehingga beberapa dari mereka hanya mengandalkan pembeli atau pelanggan yang datang ke toko mereka itupun hanya rame di waktu – waktu tertentu seperti musim libur panjang dan mendekati hari besar. Maka dari itu pendapatan yang diterima tidak pasti. Bukan hanya permasalahan modal, namun pelaku UMKM terkadang merasa kesulitan dalam mendaftarkan usaha mereka di Dinas KUKM & Disdagin karena prosedur yang dilalui nya sangat banyak apalagi beberapa dari pelaku UMKM tidak berasal dari background yang berpendidikan tinggi sehingga mereka mengeluhkan hal itu.

¹⁰ Tini Martini dan Janadi R T. *Kompetensi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Kota Bandung dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Jurnal Penelitian Pendidikan. Hal 222 Diakses dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/9616/5926> Pada 6 Juni 2020.

2.4 Kebijakan Walikota Ridwan Kamil dan Walikota Sebelumnya (Dada Rosyada) dalam menghadapi permasalahan UMKM Kota Bandung

Pada dasarnya setiap pemimpin baik itu Presiden, Gubernur dan Walikota memiliki kebijakan dan aturan tersendiri dalam menyikapi permasalahan yang ada di daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan mengeluarkan kebijakan dan peraturan sesuai aspek yang telah tercantum dalam UU No 20 Th 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

- a. *Pendanaan*, aspek pertama ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diperbolehkan membuat dan mengeluarkan anggaran belanja yang ditujukan untuk pengembangan UMKM nya dan dana tersebut akan digunakan sebagai modal yang berhak diterima oleh pelaku UMKM.
- b. *Sarana dan prasarana*, dalam hal ini Pemerintah Daerah diperbolehkan mendirikan dan menentukan lokasi khusus yang sekiranya layak untuk menjadi lokasi Pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Baik lokasi tersebut berada di luar negeri maupun dalam negeri.
- c. *Informasi usaha*, Memberikan informasi dan pembinaan terkait produksi, pengemasan, legalisasi logo Halal Mui, dll.
- d. *Kemitraan*, disini Pemerintah Daerah juga akan memfasilitasi dan mengatur pemberian insentif dana kepada Pelaku UMKM melalui inovasi dan pengembangan produk yang berorientasi eskpordan penggunaan teknolgi modern.

e. *Perizinan Usaha*, Para pelaku UMKM yang telah mendaftarkan usahanya di Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah dinyatakan legal dalam mendirikan usahanya dibawah pengawasan kedua instansi tersebut.

f. *Kesempatan Berusaha*, tiap pelaku UMKM yang berkompeten dan memiliki produk layak untuk di pasarkan, akan diberikan pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

g. *Promosi Dagang*, biasanya yang bertanggung jawab dalam promosi dagang ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang akan membuatkan web khusus maupun platform media sosial yang bisa digunakan oleh para pelak UMKM untuk mempromosikan produknya.

h. *Dukungan Kelembagaan*, selain Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, akan ada pihak lain yang terlibat baik itu Asosiasi Pedagangan Kecil, Lembaga Kreatifitas Ibu-Ibu PKK, dll¹¹.

Disini dapat diperjelas lagi dari isi UU Nomer 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah bertanggung jawab dalam membantu para pelaku UMKM di daerahnya yang mengalami kendala baik dalam pemasaran, fasilitas, permodalan dll karena bagaimanapun

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undangundang/Documents/Undang-Undang%20Nomor%2020%20Tahun%202008%20Tentang%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah.pdf> Pada 6 Juni 2020.

juga berhasil tidaknya UMKM di suatu daerah akan berdampak terhadap perekonomian daerah tersebut.

Pertama, untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Dada Rosyada(2003-2013) sendiri, fokusnya yaitu pada aspek pemasaran dan pemodalan dalam UMKM di Kota Bandung. Karena di era pemerintahannya, banyak pelaku UMKM yang terpaksa meminjam uang di Renternir atau Bank Illegal dengan jaminan yang diberikan cukup besar seperti sertifikat rumah, tanah, dll. Sedangkan modal yang dia dapatkan dari hasil pinjaman tersebut belum tentu bisa kembali dalam waktu yang singkat jika harus bergantung pada penjualan produk mereka. Mengacu pada permasalahan tersebut, maka Walikota Dada Rosyada mengeluarkan sebuah Peraturan Walikota Bandung Nomor 321 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 dengan nama kebijakan “BAWAKUMAKMUR” yang fokus pada empat aspek yaitu: (1) tumbuh dan berkembangnya UKM & Koperasi di Kota Bandung; (2) Penyerapan tenaga kerja; (3) peningkatan kemandirian, manajemen produksi distribusi dan pemasaran serta daya saing UKM & Koperasi; (4) meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat sehingga mampu mandiri dan berkemampuan daya beli. Untuk dana yang diberikan pada pelaku UMKM juga cukup bervariasi mulai dari Rp. 500.000 hingga sekitar Rp3.500.000¹².

¹² Roni Kastaman. *Evaluasi Kebijakan Pengembangan UKM Di Kota Bandung Melalui Program Bantuan Walikota Untuk Kemakmuran (BAWAKU MAKMUR)*. Proceeding Seminar Nasional. Sumedang: Universitas Padjajaran. Diakses dari https://psp-kumkm.lppm.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/21/2016/11/roni-kastaman_1.pdf Pada 25 April 2021.

Setelah periode kepemimpinan Dada Rosyada telah selesai, dilanjutkan oleh Walikota Ridwan Kamil dan perlu diketahui bahwa kebijakan Ridwan Kamil terhadap pengelolaan UMKM di Kota Bandung sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh Walikota Bandung Sebelumnya yaitu Dada Rosyada. Walikota Ridwan Kamil menyatakan bahwa:

“Pembangunan itu jangan karena beda Walikota lantas berbeda kebijakan, Beda Walikota justru ada penambahan inovasi-inovasi baru. Yang bagus jangan dihilangkan. Contoh program Pak Dada Rosyada yang bagus, saya perbaiki. Kredit Melati Warisan Pak Dada, Sata perbaiki jadi lebih baik” - Walikota Ridwan Kamil, Di Pendopo Kota Bandung Pada Jumat 18 Desember 2018¹³.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Walikota Ridwan Kamil saat itu bisa disimpulkan bahwa, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau dalam mengatasi permasalahan UMKM di Kota Bandung yaitu dengan cara mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang telah sebelumnya ada bukan menggantinya secara total. Kebijakan tersebut, tercantum pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 Tahun 2016 Tentang “ Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung”. Dengan point yang menjadi fokus yaitu : (1)

¹³ Web Resmi Humas PROKOPIM Kota Bandung. *Pembangunan Kota Bandung 2017: Banyak Keberhasilan yang Diraih*. Diakses dari <https://humas.bandung.go.id/berita/banyak-keberhasilan-yang-diraih> Pada 25 April 2021.

Pendanaan;(2)PembinaanPelaku Umkm;(3)Pemasaran&Promosi;(4)Penyusunan dokumen kerja¹⁴

Kemudian, ada beberapa poin kebijakan Walikota Ridwan Kamil yang dilakukan berdasarkan Kebijakan Ekonomi Jilid XII terkait deregulasi kemudahan berusaha atau *Easy of Doing Business (EODB)*. Walikota Ridwan Kamil berusaha untuk meningkatkan daya saing industri, peningkatan investasi dan penguatan komoditas ekspor dengan cara menyederhanakan dan memudahkan proses perizinan dan legalisasi usaha agar para pelaku UMKM tidak lagi terbebani oleh urusan perizinan, sertifikasi dan proses birokrasi yang bisa mematahkan harapan para pelaku UMKM di Kota Bandung¹⁵. Kemudahan yang diberikan oleh Walikota Ridwan Kamil terkait proses perizinan tertuang pada Peraturan Walikota Nomer 265 tahun 2016 tentang “Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 Terkait Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Terpadu” Pasal 1 Ayat 20¹⁶. Karena banyaknya keluhan yang datang dari pihak pelaku UMKM terkait perizinan usaha maka Walikota Ridwan Kamil memerintahkan instansi terkait seperti Dinas KUKM dan Disdagin untuk lebih memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus izin usaha nya.

¹⁴ Perwal 1394 Tahun 2016. Diakses dari <file:///C:/Users/HP/Downloads/Perwal-1394-TAHUN-2016-KUKM-YUYI-TTD-WLK-20-Des.pdf> Pada 25 April 2021.

¹⁵ Nur Aini. *Ridwan Kamil : Kebijakan Ekonomi Jilid XII Sejalan dengan Programnya*. Nasional Republika. Diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/o6dvgo382/ridwan-kamil-kebijakan-ekonomi-jilid-xii-sejalan-dengan-programnya> Pada 25 April 2021.

¹⁶ Peraturan Walikota Nomor 265 Tahun 2016. Diakses dari https://www.ukmindonesia.id/upload/attachment/doc/doc_3_Dasar_Hukum_Perwali_Bandung_26_5_2016_Perubahan%20Kedua%20atas%20Perwali_495_2015_SOP%20Pelayanan%20Perizinan%20Terpadu.pdf Pada 25 April 2021.

Di Era kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil, beliau juga mengeluarkan sebuah program serupa dengan nama “BAWAKUMAKMUR” yang diinisiasikan oleh Walikota Dada Rosyada dengan fokus dan tujuan yang sama yaitu pendanaan atau modal bagi pelaku UMKM Kota Bandung melalui Perkreditan Rakyat Melati (MELAWan RenTernIr) yang membedakan antara BAWAKUMAKMUR dengan Perkreditan Rakyat Melati yaitu sifat pendanaannya. Jika BAWAKUMAKMUR bersifat alokasi dana yang tidak perlu dikembalikan oleh pelaku UMKM dan memiliki nilai yang sedikit sedangkan Perkreditan Rakyat Melati bersifat dana pinjaman dengan nominal yang lebih besar dari dan wajib dikembalikan kembali namun tanpa bunga. Disisi lain dua kebijakan Walikota Ridwan Kamil dan Walikota Dada Rosyada melalui Peraturan Walikota ternyata memang sesuai dengan isi UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Dengan fokus yaitu pengembangan UMKM dan tanggung jawab aktor sub nasional dalam membawa produk UMKM di pasar internasional.

Walaupun kedua Walikota ini sama-sama ingin mengentaskan permasalahan UMKM di Kota Bandung, namun Walikota Dada Rosyada sendiri belum sempat atau belum memiliki ide untuk mengembangkan produk UMKM Kota Bandung melalui suatu proyek khusus seperti yang diinisiasikan Walikota Ridwan Kamil. Maka dari itu pada tahun 2015, Walikota Ridwan Kamil bersama Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Bandung dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Bandung bekerjasama dalam membuat inovasi baru dalam mengembangkan dan memasarkan produk UMKM Kota Bandung

melalui proyek yang dikenal dengan nama *Little Bandung*. Walaupun permasalahan UMKM merupakan fenomena lokal namun Walikota Ridwan Kamil bisa membawanya di level global sebagai solusi pemasaran produk UMKM Kota Bandung. Lalu pada tahun 2016an Dinas KUKM Indang mendaftarkan *Little Bandung* agar mendapatkan pengakuan HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) ke Kementerian Hukum dan HAM, namun sampai saat ini belum ada keputusan dan validasi dari pihak Kementerian Hukum dan Ham.

Melalui inovasi berdirinya proyek *Little Bandung* ini, diharapkan mampu membuat UMKM Kota Bandung bisa berkembang dengan baik, membuat para pelaku UMKM lebih mudah mendapatkan perizinan usaha dan percaya diri untuk memasarkan produknya ke pasar global dan memberikan pemahaman terkait ilmu manajemen pemasaran walaupun mereka tidak memiliki dasar pendidikan di bidang tersebut. Selain itu dengan adanya *Little Bandung* diharapkan mampu membuat Kota Bandung semakin maju dalam aspek pariwisatanya dan semakin terkenal di kancah Internasional baik dalam penjualan UMKMnya maupun ikon pariwisata Kota Bandung. Keberadaan *Little Bandung* juga membuat antusiasme pelaku UMKM dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas produknya agar lolos dan layak dipasarkan melalui *Little Bandung* namun produk yang dijual juga tidak bisa sembarangan karena harus memiliki legalitas ekspor dengan menjunjung tinggi nilai khas/ atau keunikan budaya Kota Bandung. Untuk penjelasan lengkap terkait *Little Bandung* dan perkembangannya di setiap Negara akan dijelaskan di Bab Selanjutnya.

2.5 Proses Seleksi Pelaku UMKM untuk Bergabung dalam *Little Bandung*

Terkait proses seleksi dan prosedur, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pelaku UMKM Kota Bandung untuk bergabung dalam *Little Bandung* yang tentunya sangat kompetitive dan Tim *Little Bandung* dari Disdagin sangat selektif dalam hal ini karena menjadi salah satu aktivitas paradiplomasi yang membawa *image* atau citra negara Indonesia di Mata Dunia. Prosedur yang harus dilalui oleh pelaku UMKM disebut dengan istilah “Kurasi” untuk menyeleksi pelaku UMKM yang ingin memasarkan produknya melalui *Little Bandung*. Pada tahun 2018, ada sekitar 6000 UMKM yang mendaftarkan produk atau brand nya di DISDAGIN dan sudah ada 150 UMKM yang lolos seleksi. Bagi pelaku UMKM yang akan melalui proses kurasi, perlu memperhatikan syarat-syarat berikut:

1. Mempersiapkan desain material atau kemasan produk semenarik mungkin melalui portofolio, katalog maupun Power Point presentasi yang digunakan untuk presentasi di hadapan tim kurasi *Little Bandung*.
2. Kualitas dan keterjangkauan harga produk yang harus sesuai dengan hasil riset pasar.
3. Kemampuan pelaku UMKM agar bisa mempresentasikan produk UMKM Kota Bandung dengan membawa unsur – unsur budaya atau ikon Kota Bandung di Pameran Dagang Internasional. Karena *Little Bandung* bukan hanya sebagai sarana atau *tools* bagi mereka untuk memasarkan produknya tapi juga menjadi

ajang bagi Indonesia untuk memperkenalkan salah satu produk daerahnya di Pasar internasional dan inilah salah satu bentuk aktivitas paradiplomasi.

4. Jika memang pelaku UMKM telah memenuhi prosedur nomor 1-3 dan dinyatakan lolos oleh Tim Kurasi *Little Bandung*, maka selanjutnya Pihak Disdagin akan memberikan pendampingan ataupun edukasi secara menyeluruh. Dari segi pengemasan produk, pendampingan sertifikasi halal, pembuatan hak cipta, kelayakan rasa, kualitas dan harga pasar. Setelah pembinaan yang dilakukan oleh Tim Kurasi Little Bandung dan Tim dari Dinas Perdagangan & Perindustrian selesai, maka pelaku UMKM yang terpilih akan berpartisipasi dalam event *Little Bandung Creative Craft Market* sebuah pameran dagang yang diselenggarakan oleh Disdagin Kota Bandung pada 10-13 Mei tahun 2018¹⁷. Segala persiapan dan kebutuhan finansial dalam pameran dagang ini mendapatkan dana APBD Kota Bandung untuk proses pengiriman/ekspedisi barang UMKM, biaya keberangkatan pelaku UMKM, dan biaya para Tim yang mengelola Little Bandung.
5. Pelaksanaan pameran dagang Negara tujuan/ Negara mitra Pemerintah Kota Bandung melibatkan Staff Disdagin yang fokus pada Little Bandung, Staff Kerjasama Kota Bandung, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Pelaku UMKM Terpilih, Staff Kedutaan Besar di Negara tujuan.

¹⁷ Nurul Staff Humas Kota Bandung. Disdagin Bina 6000 UMKM untuk Masuk Little Bandung. Diakses dari <https://humas.bandung.go.id/berita/disdagin-bina-6-000-produk-umkm-untuk-masuk-little> Pada 24 Februari 2021